

DOMINASI ORANG-ORANG BESAR DALAM SEJARAH INDONESIA: KRITIK POLITIK HISTORIOGRAFI DAN POLITIK INGATAN

Ganda Febri Kurniawan, Warto, Leo Agung Sutimin

Program Studi Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Alamat korespondensi: gandafk4@gmail.com

Diterima/ *Received*: 30 Desember 2018; Direvisi/ *Revised*: 4 Maret 2019; Disetujui/ *Accepted*: 4 Maret 2019

Abstract

This paper departs from the restlessness of some scientists about the dominant of the big man in Indonesia's historical narrative. It also becomes a form of public memory about the meaning of heroism which is more likely to be cultured rather than understanding academically. This article was composed an academic criticism of the conditions mentioned above, the political term historiography or historical writing that is used as a political interest is the most appropriate in describing Indonesia's current historiographic conditions. The dominance of the big man in history requires to be distorted and historiography needs to provide a place for stories of local heroes. Besides, memory politics also requires to be dammed through a counter-narrative that can be presented through critical historical studies, so that the desire to remember the forgotten will continue to live and become a guide for thinkers and activists of history.

Keywords: *Big Man; Politic of Historiography; Politic of Memory.*

Abstrak

Tulisan ini berangkat dari keresahan beberapa ilmuwan tentang dominasi orang-orang besar dalam narasi sejarah Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi pembentuk ingatan masyarakat tentang makna kepahlawanan yang lebih cenderung bersifat mengkultuskan ketimbang memahami secara akademis. Artikel ini lahir sebagai sebuah kritik akademis terhadap kondisi tersebut di atas. Istilah politik historiografi atau penulisan sejarah yang digunakan sebagai kepentingan politik adalah yang paling sesuai dalam menggambarkan kondisi historiografi Indonesia saat ini. Dominasi orang-orang besar dalam sejarah perlu didistorsi dan historiografi perlu memberikan tempat bagi kisah-kisah tokoh tingkat lokal. Selain itu politik ingatan juga perlu dibendung melalui *counter* narasi yang dapat dihadirkan melalui kajian-kajian sejarah kritis, sehingga hasrat mengingat yang dilupakan akan terus hidup dan menjadi pedoman baik bagi para pemikir maupun pegiat sejarah.

Kata Kunci: Orang-orang Besar; Politik Historiografi; Politik Ingatan.

PENDAHULUAN

Setelah keruntuhan Orde Baru dan kepemimpinan Soeharto yang terlalu condong ke blok kapitalis, penulisan sejarah Indonesia belum banyak berubah. Pada masa itu, banyak unsur politik ingatan yang hanya digunakan sebagai pengukuhan kekuasaan Soeharto di Indonesia selama 32 tahun. Nordholt, dkk (2008: 1)

menyebut perilaku kekuasaan dalam mengendalikan sejarah sebagai "Politik Historiografi". Hal itu biasanya digunakan sebagai medium dalam melakukan pembenaran terhadap kebijakan-kebijakan atau konsensus sebagian elite politik yang tidak memikirkan kondisi akar rumput. Dalam narasi sejarah yang diciptakan Orde Baru, kiprah Soeharto dipertunjukkan sebagai tokoh penyelamat bangsa atau mesias dalam tradisi Barat.

Penghancuran Partai Komunis Indonesia pada 1965-1966 adalah titik balik, yang menempatkan Soeharto sebagai seorang militer pinggiran menjadi tokoh kunci dalam penghancuran ideologi komunis di Indonesia.

Generasi yang terlahir antara 1970-1990 masih mengagungkan sosok Soeharto sebagai sebuah mitos dalam sejarah modern Indonesia. Sementara itu, Soekarno (salah seorang *founding fathers* Bangsa Indonesia) yang telah berjasa dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dikubur dalam-dalam peranan, pikiran, dan kiprahnya (Hasan, 2012: 82). Penulisan sejarah yang demikian tentu perlu dikritisi, konsep-konsep *big man* masih dominan digunakan dan hal itu menjadikan sejarah yang seharusnya memiliki unsur edukatif menjadi identik dengan doktrin. Setelah reformasi, corak historiografi Indonesia belum terlepas dari pola lama. Penulisan sejarah dalam buku teks masih diwarnai dengan kisah-kisah heroisme yang lebih bermakna politik daripada estetis dan etis. Purwati (2018: 1) menjelaskan melemahnya idealisme, patriotisme, dan mengendapnya semangat kebangsaan disebabkan oleh narasi sejarah yang terlalu kental dengan wacana politik, yang di dalamnya mengandung kisah-kisah segelintir orang yang diagungkan. Suyatno (2000: 153 dalam Agung, 2015: 239) menerangkan bahwa di abad ke-21 penulisan sejarah Indonesia harus sepenuhnya digeser menuju ke arah yang lebih etis, bukan saja *big man*, sejarah harus memberi ruang kepada orang-orang kecil di daerah.

Era reformasi yang berlangsung sejak 1998 hingga saat ini ternyata belum banyak mengubah corak historiografi Indonesia. Narasi yang didominasi kisah *big man* dalam penulisan sejarah ala Orde Baru ternyata tidak pernah dikritisi secara serius, sehingga menimbulkan paradoks di dalam memahami sejarah. Bahkan saat ini, Soekarno yang namanya pernah dikubur oleh Orde Baru dimunculkan kembali sebagai ikon perjuangan rakyat, tetapi sebenarnya hal itu simbolisme belaka, yang tidak memiliki makna khusus daripada sekadar upaya politik. Pada penulisan sejarah Indonesia pasca-Orde Baru, pemikiran-pemikiran Soekarno kembali dikaji, dipelajari, dan ditiru sedemikian rupa. Hal itu tidak merubah pola lama yang dikembangkan Orde Baru, sejarah tetap

saja berkuat dengan kisah-kisah *big man*. Historiografi seharusnya lebih bersifat demokratis dengan mengutamakan demokrasi dan aksesibilitas yang terbuka (Natalia 2016: 64). Sejauh ini, menurut Kuntowijoyo (2003: 45) sejarah belum ditulis secara adil, keseimbangan dalam penulisan sejarah dapat dilakukan melalui intelektualitas yang organik dan tidak mengikuti arus.

Sejarah diibaratkan sebagai mosaik yang memiliki bagian-bagian mikro untuk dirangkai menjadi bangunan kisah yang utuh, narasi sejarah kepahlawanan dalam sejarah Indonesia tidak disusun secara utuh, sehingga melahirkan anomali dalam memahami sejarah. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Soeharto, dan Soedirman masih diagungkan sebagai mesias dalam sejarah Indonesia. Konstruksi pengetahuan semacam itu telah membunuh kiprah tokoh lain yang juga memiliki jasa dalam membangun Indonesia, misalnya Nitisemito seorang saudagar kaya raya dari Kota Kudus di Jawa Tengah yang juga ikut membantu memberikan dana perjuangan kepada kaum pergerakan menuju Indonesia merdeka (Suharso, 1994: 66). Historiografi belum diarahkan kepada tokoh-tokoh seperti Nitisemito, sehingga pemaknaan terhadap kepahlawanan menjadi dangkal dan kurang mendalam.

Periode 1908 hingga 1945 merupakan masa-masa kebangkitan nasional Indonesia, ketika kiprah organisasi maupun tokoh sangat mudah dijumpai dalam historiografi Indonesia, namun demikian kiprah tokoh yang dibesarkan hanya yang berasal dari kalangan militer dan elite sipil, sedangkan sejarah pada masa itu belum memotret kiprah saudagar, pejuang pendidikan, masyarakat miskin kota, petani desa yang ikut membantu perjuangan dan kaum buruh yang ikut serta dalam rangkaian mobilisasi massa menentang kebijakan Belanda. Pascaperiode tersebut, di era 1945-1949 ketika Indonesia menginjakkan kakinya pada masa revolusi, pola pengkajian belum banyak berubah. Sejarah ditulis dengan mengandalkan poros elite politik dan militer. Klaim perjuangan yang diciptakan telah menjadikan sejarah lebih mirip mitos daripada kajian ilmiah tentang masa lalu. Nordholt, dkk. (2008: 56) menjelaskan, politik historiografi telah meruntuhkan bangunan ilmiah dari sejarah, yang dipertontonkan dalam politik

historiografi hanyalah hegemoni kekuasaan dan heroisme semu.

Kegagalan dalam melahirkan historiografi yang berkeadilan telah berpengaruh dalam proses memahami sejarah itu sendiri. Narasi sejarah kepahlawanan dalam sejarah Indonesia telah terbawa oleh kisah legenda Ratu Adil, sehingga nuansa yang dibawa dalam penulisan sejarah tokoh adalah berlebihan, tidak netral, dan tinggi pretensi. Tokoh-tokoh yang diceritakan dalam sejarah biasanya terseleksi secara politik, sehingga penulisan sejarah tokoh adalah murni milik penguasa, misalnya ketika Partai Golkar berkuasa, tokoh Soeharto menjadi ikon yang tidak bisa dihilangkan dari papan-papan reklame sepanjang jalan kota besar hingga jalanan pedesaan. Contoh lain, ketika Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berkuasa maka tokoh yang diagungkan dan dijadikan simbol kekuatan adalah Soekarno. Jembatan, tembok, jalanan kota, hingga gang sempit di kampung-kampung dipenuhi dengan lambang partai dan foto Soekarno. Lebih jauh, politik historiografi saat ini merambah ke ranah pendidikan melalui buku teks. Mulyana (2013: 84) menyebutnya sebagai gejala janggal dalam membangun kesadaran sejarah dan nasionalisme. Disebut janggal karena usaha membangun kesadaran sejarah tidak disertai dengan kesadaran dalam menuliskan sejarah secara adil.

Tulisan ini ingin memberikan sebuah kritik akademis terhadap politik historiografi dan politik ingatan yang masih melekat dalam penulisan sejarah Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah pada historiografi kepahlawanan. Periode yang dijadikan pembatasan waktu adalah antara 1908 hingga 1949 yang merupakan serangkaian upaya dalam menjatuhkan kolonialisme Belanda di Indonesia. Di bagian akhir artikel ini akan diberikan alternatif-alternatif gagasan dalam merumuskan sejarah Indonesia secara berkeadilan. Sejarah yang ditulis secara berkeadilan artinya sejarah bukan hanya milik *big man*, melainkan sejarah juga milik orang-orang kecil. Narasi kepahlawanan perlu menampilkan pahlawan yang dilihat dari sudut pandang berbeda, supaya pengetahuan tentang kepahlawanan tidak mengendap. Artikel ini penting disebarluaskan karena mencoba memberikan alternatif dalam memahami sejarah Indonesia.

NARASI ORANG-ORANG BESAR DALAM SEJARAH INDONESIA

Buku-buku teks saat ini dihiasi dengan kajian tentang orang-orang besar. Di toko-toko buku dan perpustakaan, sejarah hanya disuguhkan dalam kisah-kisah heroisme dengan mengandalkan peranan *big man*. Mulyana (2013: 89) menjelaskan bahwa narasi heroisme yang ada dalam buku terlalu bersifat politis, padahal inti dari kisah kepahlawanan adalah nilai atau etika yang dapat dijadikan sebagai sumber refleksi. Abdullah (1999: 53) juga berpendapat bahwa beberapa karya sejarah tentang Indonesia, tidak sedikit mengeksplorasi kehidupan raja-raja dan memoles istananya secara monografis, terutama karya-karya yang terbit sebelum 1900-an. Sejarah terasa kaku dan sangat elitis, yang dalam konteks ini disebut sebagai “sejarah sakral”.

Historiografi Indonesia dibagi ke dalam tiga periodisasi penting yaitu: 1) historiografi sebagai upaya dalam melepaskan diri dari nirlandosentrisme atau gaya penulisan sejarah yang didominasi oleh sejarah bangsa Belanda; 2) historiografi nasional, yaitu penulisan sejarah yang ditujukan untuk membangkitkan nasionalisme masyarakat; dan 3) historiografi pencerahan, yang dicetuskan oleh Kuntowijoyo sebagai sebuah alternatif dalam memahami sejarah bangsa Indonesia secara jernih dan berkeadilan. Sejarah yang demikian pada kemudian hari melahirkan aliran baru dalam sejarah Indonesia yaitu “sejarah kontroversial”. Kajian mengenai sejarah lokal hanyut ke dalam periodisasi yang ketiga, yaitu dalam konteks historiografi pencerahan yang bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam menjelaskan sejarah. Sejarah lokal, secara aksiologis berperan untuk menjaga akar budaya masyarakat (Kurniawan, 2018: 163).

Gelombang Reformasi 1998 telah membuat sejarawan lebih gigih dalam menginisiasi pencerahan-pencerahan dalam proses pembukuan sejarah. Termasuk di dalamnya pembukuan tentang sejarah pahlawan-pahlawan. Pada konteks perjuangan melawan kolonialisme Belanda, tokoh-tokoh yang selama ini masih mendominasi narasi adalah Soekarno, Soeharto, Nasution, Natsir, dan Soedirman. Ideologi yang diunggulkan dalam sejarah Indonesia adalah Islam, Nasionalisme, dan

Militer. Padahal dalam konteks historis, tiga kekuatan utama dalam mengusir penjajah kolonial Belanda bertumpu pada Islam, Komunis, dan Nasionalis. Dalam perkembangannya, ketiga kelompok tersebut bahu membahu untuk berjuang meruntuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia.

Soekarno adalah tokoh nasionalis sejati dan pembesar Islam di Indonesia yang namanya harum di negara-negara Timur Tengah. Ketokohan Soekarno menyerupai Genghis Khan Hasar dari legenda kerajaan Mongolia (Nikolay, dkk., 2018: 75). Ia merupakan representasi dari mesianisme dalam konteks Indonesia, atau dalam kebudayaan Jawa dikenal dengan istilah Ratu Adil. Gerakan Ratu Adil menurut Kartodirdjo (1984: 19) adalah tindakan kepeloporan pembebasan masyarakat yang proses penunjukan pada pemimpinnya menggunakan pendekatan teologi agama. Para tokoh yang digandrungi dan memiliki kharisma biasanya diidentikan sebagai Ratu Adil, karena ia telah menanamkan pengaruh yang besar di dalam kehidupan masyarakat, serta kekuatan magis yang tervisualisasikan melalui gestur menambah pengaruh Soekarno di masyarakat Indonesia (Nonna, 2018: 165). Soekarno, menurut Kartodirdjo (1984: 98) adalah Ratu Adil atau mesias dalam konteks Indonesia. Peranan heroiknya dalam mengusir penjajah kolonial Belanda merupakan pen-capaian luar biasa dalam proses dekolonisasi yang dikerjakan sejak awal abad ke-20. Memori tentang Soekarno terbina melalui teks lisan dan tulisan secara sistemik, dibalik itu banyak konteks simbolis dari ketokohan Soekarno yang tumpang tindih sehingga memahami realitas Soekarno cukup rumit saat ini (Dmitri, 2016: 42).

Pada masa Orde Baru berkuasa antara 1966 hingga 1998, ketokohan Soekarno dikubur dalam-dalam beserta kisah-kisah Ratu Adil yang melingkupinya. Arah penulisan sejarah diubah sedemikian rupa dengan tujuan untuk melakukan de-Soekarnoisasi. De-Soekarnoisasi ini menurut Adam (2018: 17) adalah upaya menggerus pengaruh Soekarno hingga ke akar-akarnya. Proses itu dalam praktiknya diikuti dengan pembasmian kelompok sayap kiri yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara sadistik, pembasmian itu telah melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Dari mulai dibunuh di tempat

hingga di buang ke Pulau Buru (Diasingkan), semua cara dilakukan untuk menghilangkan jejak Soekarno di Indonesia (Jaiz, 1999: 167). Cara itu tergolong efektif, terhitung sejak 1970 arah penulisan sejarah resmi berganti, nama Soekarno menghilang dari berbagai peristiwa sejarah yang penting, kemudian muncul nama baru yang diagungkan dalam sejarah Indonesia, yaitu Soeharto. Ia merupakan seorang Perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berasal dari kelompok pinggir, pada peristiwa G30S 1965 meletus. Namanya tidak pernah diperhitungkan sebagai calon pengganti Soekarno, tetapi skenario CIA dan konspirasi militer telah melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun (Carnegie, 2008: 9).

Soeharto melalui arsitek intelektualnya dari Universitas Indonesia, yaitu Nugroho Notosusanto telah menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi politik. Setelah kelompok pendukung Soekarno dihancurkan, sebagian dibunuh, dan sebagian lagi dibuang ke Pulau Buru, Soeharto kemudian melenggang bebas tanpa tertandingi. Soeharto yang semula tidak pernah muncul dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah seperti Serangan Umum 1 Maret 1949, Gerilya Militer 1945-1949, Perebutan Irian Barat 1945-1963, dan Peristiwa G30S 1965, pada perkembangan berikutnya ia muncul seperti pemeran utama dalam setiap kisah heroik bangsa Indonesia. Namanya diangkat untuk menandingi kebesaran Soekarno. Media yang digunakan oleh Soeharto dalam melakukan pembenaran terhadap manipulasi sejarah yang dirancang salah satunya adalah film. Berbagai macam film yang bermuatan politik dan penuh kebohongan telah menyihir masyarakat untuk tunduk dan bertekuk lutut di bawah kekuasaan kapitalis Soeharto.

Soekarno dan Soeharto adalah *big man* dalam sejarah Indonesia, meskipun sejarah telah melukiskan kisah keduanya dalam catatan hitam dan putih, tetapi kecintaan masyarakat untuk terus mengkultuskan mereka berdua masih berlangsung hingga saat ini. Hal itu dilegitimasi melalui buku-buku pelajaran sejarah di sekolah dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi. Pada dua buku pelajaran sejarah yang paling sering digunakan di sekolah, yaitu buku yang diterbitkan oleh Penerbit Airlangga dan buku yang diterbitkan oleh

Pemerintah, nama Soekarno dan Soeharto sangat mendominasi.

Jika dibandingkan tokoh-tokoh lain dalam sejarah, seperti Tjokroaminoto, Moh. Hatta, dan Soedirman, nama Soekarno dan Soeharto tetap mendominasi dalam narasi sejarah Indonesia. Kuntowijoyo (2008: 88) menjelaskan bahwa pascareformasi ketokohan Soekarno kembali dipulihkan, buku-buku pelajaran banyak memuat tentang kiprah dan pemikirannya. Kini Soekarno kembali dipelajari, namun dalam konteks pengkultusan, tidak ada koreksi yang jernih untuk dapat menyuguhkan sejarah secara lebih objektif.

Sebaliknya, nama Soeharto yang telah direkam abadi di dalam jilid 6 buku Sejarah Nasional Indonesia yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dkk., kini kepopulerannya menyusut, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi popularitas Soeharto dikalahkan Soekarno. Salah satu faktor yang menyebabkan nama Soeharto menyusut adalah karena semua kebohongan Orde Baru tentang sejarah telah membuat masyarakat intelektual geram. Orde Baru menurut Crouch (2010: 129) telah menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang tidak tepat, yang paling fatal adalah sejarah. Orde Baru merubah sejarah secara monoteistik seperti perilaku Raja Jawa di masa lalu, sejarawan adalah pujangga yang hanya akan menuliskan kebaikan-kebaikan penguasa. Tanpa disadari keadaan berubah dan pikiran yang telah dikendalikan selama 32 tahun kini berbalik menyerang penguasa Orde Baru yang sangat condong pada kepentingan Amerika dan Barat.

Big man dalam sejarah Indonesia telah menjadikan sejarah yang sukar dipahami secara akademis. Masalah-masalah tafsir historiografi yang didominasi *big man* mencirikan keadaan kebudayaan yang masih sangat feodal (Marshall, 2018: 31). Sejarah menjadi kering nilai dan estetika. Hook (1999: 76) menjelaskan bahwa seharusnya historiografi dapat mengakomodasi segala kisah kepahlawanan, dari segi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kebudayaan. Perspektif kepahlawanan yang hanya digambarkan dalam peranan politik semata harus dirubah. Sejarah yang demikian hanya akan melahirkan *big man*, dan membunuh kiprah tokoh lain yang juga memiliki peranan penting dalam melawan penjajahan

Belanda di Indonesia. Di kota-kota kecil di Jawa, banyak tokoh yang berperan besar dalam sejarah namun tidak terpotret secara jelas melalui historiografi, misalnya Nitisemito Raja Kretek dari Kota Kudus, Ahmad Djunaid Raja Batik dari Pekalongan, Tasripin Raja Kulit dari Kota Semarang, dan Oei Tiong Ham Raja Gula dari Kota Semarang, keempatnya adalah saudagar-saudagar yang ikut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur non-politik.

Kolonialisme dan Para Penentangannya di Indonesia yang Dilupakan Sejarah

Kolonialisme Belanda merupakan yang paling lama bertahan di Indonesia, yaitu 350 tahun. Kolonialisme Spanyol, Portugal, Prancis, dan Inggris tidak sempat bertahan lama karena dinamika internasional pada waktu itu menyebabkan pembagian wilayah Asia Tenggara sebagai daerah yang menjadi bagian dari imperialisme Barat. Kolonialisme Belanda berlangsung dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Sisa-sisa kebudayaannya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Kolonialisme telah meruntuhkan sistem nilai dalam masyarakat di Indonesia. Pergeseran yang sangat luar biasa terjadi, dari segi sosial, ekonomi, hukum, hingga politik sejak Belanda berkuasa di Indonesia. Pada masa kolonialisme, kesadaran masyarakat terjajah dikendalikan, kebebasan menjadi barang mewah yang sulit didapatkan (Ankersemit, 1987: 76).

Kesadaran tentang keterjajahan telah memunculkan kebangkitan masyarakat jajahan, yang dalam dunia Islam disebut sebagai era reformisme (Steenbring, 1984: 45). Di negara-negara bercorak Islam, para aktivis pergerakan telah menghadirkan aktivitas yang cukup sintetik sebagai respons terhadap imperialisme Barat, sehingga memunculkan berbagai bentuk pergerakan dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat. Lemahnya dunia Islam dari berbagai segi pascakejayaan Dinasti Mesir Serbuk (Said, 1977: 90), telah dimanfaatkan oleh bangsa Eropa Barat sebagai senjata untuk menancapkan kaki imperialismenya atas dunia Islam. Tatanan dunia baru dari Eropa Barat di era teknis modern telah memaksa umat Islam untuk mengubah strategi pergerakan. Salah satu yang paling keras

menentang kolonialisme dan imperialisme Belanda adalah Indonesia.

Historiografi hanya mencatat perjuangan melawan penjajahan Belanda dari segi politik. Sejak awal abad ke-20, aktivitas pergerakan dalam bentuk aktivitas politik lebih banyak diulas dalam penulisan sejarah Indonesia. Masa itu disebut sebagai masa kebangkitan nasional (Shiraisi, 1990: 43). Nama Soekarno dalam konteks ini banyak sekali disebut, dijuluki Sang Putra Fajar, ia digambarkan sebagai martir dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Selain Soekarno ada pula Hatta. Ia merupakan tokoh Perhimpunan Indonesia di Belanda, sekelompok pelajar Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Eropa untuk kelas yang dipersiapkan sebagai pegawai-pegawai penggerak mesin imperialisme Belanda.

Pada periode 1945-1949, peran Soeharto begitu menonjol. Ia digambarkan sebagai tentara yang gigih dan penuh strategi. Beberapa kali Soeharto dimunculkan dalam kisah sejarah yang menceritakan tentang heroisme militer. Kisah itu di antaranya adalah Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta, Serangan Umum itu bertujuan memukul mundur militer Belanda yang mencoba melakukan penguasaan di Jawa setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Wertheim (1996: 90) menjelaskan, bahwa sebenarnya tokoh Soeharto tidak begitu menonjol dalam peristiwa tersebut, justru yang berperan besar dalam peristiwa penyerangan itu adalah Jenderal Soedirman yang merupakan Panglima Militer pertama Indonesia. Ketokohan Soeharto dimunculkan dan menguat dalam catatan sejarah setelah Orde Baru berkuasa dan ia menjadi Presiden. Hal ini menunjukkan, bahwa kemenangan politik di Indonesia juga merupakan kemenangan intelektual. Penguasa dengan bebas mengendalikan kehidupan akademik, termasuk sejarah yang diatur untuk kepentingan legitimasi.

Pengetahuan sejarah heroisme yang demikian telah membentuk konstruksi pengetahuan di masyarakat, bahwa pahlawan selalu lekat dengan kiprah politik atau militer. Padahal makna kepahlawanan begitu luas, dan tindakan heroisme dapat dilakukan dalam konteks apa pun. Suryana (2012: 132) berpendapat, bahwa pahlawan juga tidak terbatas pada konteks politik

atau militer, karena kedua aspek itu sangat dominan dalam materi pendidikan saat ini. Pahlawan juga bisa timbul dari aspek kehidupan yang lain, seperti pahlawan ekonomi, pahlawan budaya, dan pahlawan sosial. Wood (2013: 42-50) menjelaskan perkembangan penggunaan buku pelajaran sejarah dan tipe narasi sejarah yang dikembangkan sejak zaman kolonial Belanda hingga zaman Orde Baru yang secara ideologis tidak banyak berubah. Dengan demikian, proses pembentukan pengetahuan tentang makna kepahlawanan di masyarakat juga tidak banyak berubah, secara konseptual pahlawan selalu menggunakan baju politik dan kekuasaan.

Sejarah sudah semestinya mulai ditulis dengan tujuan untuk pencerahan. Tokoh-tokoh kecil di daerah yang memiliki peranan dalam menentang kolonialisme melalui jalan non-politik juga perlu diabadikan melalui penulisan sejarah. Kisah-kisah seperti Nitisemito, seorang Raja Kretek dari Kota Kudus, Jawa Tengah juga perlu diangkat. Nitisemito merupakan pengusaha modern yang hidup pada awal abad ke-20, ketika ekonomi modern mulai dikenal oleh masyarakat pribumi. Industrialisasi awal pada masa itu mengguncang masyarakat dan kebudayaan (Kuntowijoyo, 2006: 12). Nitisemito merupakan saudagar yang ikut memberikan bantuan dana perjuangan untuk mengalahkan Belanda dalam percaturan politik. Nitisemito, kata Sitepoe (2000: 14) merupakan pengusaha terkemuka di tahun 1909 yang memiliki pabrik rokok "Tjap Bal Tiga" yang mempekerjakan ribuan buruh hingga mencapai angka 10.000 pekerja. Rokok kretek sebagai salah satu produk industri yang khas, baru berkembang pada 1930, yaitu di Kudus, Semarang dan Surakarta yang pada zaman kolonial Belanda biasa disebut "*stootjes*", sedangkan perusahaan yang membuatnya disebut "*stootjes fabriek*". Menurut Budiman dan Onghokham (1977: 98), pesatnyanya kemajuan pabrik milik Nitisemito merangsang kemunculan ratusan industri rokok kretek baru, sehingga lahirlah perusahaan-perusahaan rokok besar yang tidak hanya tumbuh di Kota Kudus, tetapi juga kemudian di kota lain seperti British American Tobacco di Semarang dan Cirebon, H. M. Sampoerna di Surabaya, Faroka di Malang, Gudang Garam di Kediri, Cerutu Tarumartani di Yogyakarta, dan Klembak Menyan

Eng Siong di Gombang. Dari data itu dapat dikatakan bahwa, seluruh daerah di Pulau Jawa mendapat pengaruh langsung dari keberadaan Pabrik Rokok Tjap Bal Tiga milik Nitisemito.

Castle yang studinya pada kontribusi Nitisemito melalui pabrik rokok Bal Tiga, menunjukkan seberapa besar sumbangan industri kretek yang bermula dari Kudus dan menyebar di beberapa kota di Jawa (Castle, 1982: 39) hingga ia dijuluki sebagai “Raja Kretek”. Istilah “Raja Kretek” menurut Alex Soemadji Nitisemito (Anak Nitisemito) adalah sebuah julukan yang diberikan oleh Ratu Wilhelmina kepada Nitisemito. Pada dua dekade pemerintahan, baik pemerintah Hindia Belanda menyambut baik pertumbuhan industri kretek, karena nilai ekonomis bagi pemerintah tinggi melalui pajak cukai. Hal yang sama juga dirasakan pemerintahan Soekarno (Radjab, 2013: 121).

Pada waktu Presiden Soekarno berpidato ke kota-kota seperti di Semarang maupun di Yogyakarta, Nitisemito berangkat menuju Salatiga, karena di sana ia memiliki rumah pribadi dengan tujuan untuk menemui Soekarno. Diam-diam Nitisemito membantu perjuangan pergerakan nasional melalui tokoh-tokohnya. Nusjirwan mengemukakan, bahwa eyang bisa dikatakan membantu pergerakan dengan sokongan dana untuk melancarkan perjuangan. Pernah sekali waktu Nitisemito mengajak puteranya Soemadji pergi ke Semarang dengan kereta. Nitisemito membawa sejumlah uang yang diwadahi dengan setoples yang berukuran besar. Menurut Nusjirwan, ia akan mendatangi sebuah rapat rahasia pergerakan nasional di Semarang dan memberikan uang tersebut untuk keperluan pergerakan.

Keadaan yang demikian sudah seharusnya cukup untuk menilai keseriusan Nitisemito dan keluarganya tidak hanya di bidang industri kretek, namun keadaan mampu menggugah keaslian bangsa yang dirasa Nitisemito dengan turut serta membantu pergerakan nasional, meskipun secara tidak langsung. Memang masih dapat dipertanyakan apakah pernyataan ahli waris Nitisemito ini agak dilebih-lebihkan atau tidak. Kecenderungan menduga-duga memang wajar, apalagi dengan di pengambilan sumber primer, yakni langsung dari ahli warisnya.

Selain Nitisemito, ada pula pejuang ekonomi yang tidak pernah disebut-sebut dalam sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Ia adalah Oei Tiong Ham, seorang warga keturunan Tionghoa yang dijuluki sebagai Raja Gula dari Kota Semarang. Pada waktu itu, kedudukan masyarakat Tionghoa berada di atas masyarakat pribumi. Hal ini karena kebijakan Benteng *Stelsel*, yaitu pemisahan pemukiman penduduk berdasar pada etnis. Komunitas Tionghoa dalam sejarah Indonesia dianggap sebagai masyarakat yang eksklusif dan tidak pernah mau menjadi bangsa Indonesia seutuhnya (Fernando, 1992: 3). Mereka hanya dijadikan sebagai mesin penggerak roda ekonomi karena kepiawaian mereka dalam mengelola perdagangan. Meskipun mereka dianggap sepele secara politik, tetapi komunitas Tionghoa menjadi pendongkrak pendapatan pemerintah kolonial melalui penjualan komoditas-komoditas ke luar negeri. Kisah Oei Tiong Ham cenderung unik. Ia adalah seorang Tionghoa yang rasa cintanya kepada Bangsa Indonesia melebihi apapun. Ia berjuang bersama kaum pergerakan di awal abad ke-20 untuk mengusir bangsa Belanda dari Indonesia. Ia memanfaatkan statusnya yang dekat dengan Belanda untuk memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan situasi kolonialisme. Oei Tiong Ham Bank tercatat sebagai penyumbang dana perjuangan yang lumayan besar demi mendukung pergerakan kebangsaan Indonesia.

Yuliati (2009: 109) menyatakan keberadaan seorang konglomerat Cina di Semarang yang sangat terkenal adalah Oei Tiong Ham (1866-1924), si raja gula (Ling dalam Kunio, 1991: 219). Ia bermukim di Gergaji, yang ketika itu juga menjadi tempat pemukiman orang-orang Eropa. Rumahnya tidak hanya megah, indah, dan luas, tetapi juga dilengkapi dengan kebun binatang pribadi dengan berbagai macam binatang seperti beruang, ular, merak, burung kasuari, kera, menjangan, dan lain-lain. Setiap minggu kebun binatang ini dibuka untuk umum dengan harga tiket masuk yang murah, sehingga dapat menjadi sarana rekreasi bagi rakyat Semarang. Di kalangan masyarakat Semarang tempat itu dikenal dengan sebutan “Kebon Rojo” (Budiman dalam *Suara Merdeka* 23-7-1976). Oei Tiong Ham adalah seorang pengusaha yang terkenal di hampir

seluruh dunia: Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Di Indonesia ia memiliki lima pabrik gula yaitu: Rejoagung, Kregbet, Tanggulangin, Pakis, dan Ponen. Induk perusahaannya bernama Oei Tiong Ham Concern dan cabang-cabangnya adalah N.V. Handel Maatschappij Kian Gwan serta N.V. Algemeene Maatschappij tot Exploitasi der Oei Tiong Ham Suikerfabrieken (Ling dalam Kunio, 1991: 227).

Nitisemito dan Oei Tiong Ham merupakan segelintir tokoh yang namanya tenggelam oleh narasi sejarah yang didominasi oleh *big man*. Orang-orang besar itu jika dikultuskan maka cukup berbahaya dalam membangun pengetahuan sejarah. Soekarno dan Soeharto, seharusnya tidak berlebihan digambarkan dalam sejarah, atau perlu ditentukan batas wajar dalam menuliskan sejarah tokoh-tokoh besar seperti mereka, dengan memegang prinsip tetap memperhatikan kiprah tokoh lain yang dapat dijadikan pembelajaran untuk melangkah ke depan. Kartodirdjo (2016: 104) menjelaskan, bahwa setiap orang adalah bagian dari komunitas, dan setiap komunitas memiliki sejarah yang penting diingat sebagai memori kolektif. Setiap komunitas selalu memiliki nilai-nilai yang berakar pada tradisi yang telah berkembang lintas generasi. Maka dari itu, mengingat sejarah perjuangan Nitisemito dan Oei Tiong Ham adalah sebuah upaya menumbuhkan memori kolektif yang keluar dari zona politik Hook (1999: 7) menjelaskan, bahwa sejarah kini tidak sesuai jika hanya dipelajari melalui pendekatan politik, sejarah juga perlu dilihat dalam konteks pencerahan. Menulis sejarah tokoh kecil merupakan kerja akademis yang bermahzab pencerahan.

Heroisme dalam Sejarah Indonesia: Antara Mitos dan Realitas

Pada rambu tentang mengungkapkan “sejarah dari dalam”, Kartodirdjo bermaksud mengembangkan sejarah yang otonom (*autonomous history*) sebagai solusi kontroversi antara sejarah kolonial dan sejarah nasional (Ileto, 2002: 132). Salah satu unsur sejarah otonom adalah kesadaran akan terdapatnya perbedaan etnik. Nagazumi (1968: 219) berpendapat bahwa “*only studies carried out by Asians could be regarded as Asia-centric. This*

he rejected as meaningless since, if it were true, no non-Asians could expect to study Asia” atau hanya kajian yang dilakukan oleh orang Asia yang dapat dinilai sebagai Asia-sentris. Dari perspektif ini, sejarah Indonesia hanya dapat diteliti dengan representatif oleh sejarawan Indonesia. Sejarah Indonesia yang direkonstruksi oleh sejarawan Barat kurang bermakna, karena tidak dapat sepenuhnya memahami kebudayaan Indonesia dan pandangan dunianya yang terrepresentasi pada fenomena historis. Kajian Indonesia yang dilakukan oleh Barat dicurigai akan tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum Orientalis yang menggambarkan Timur sebagai “*were not like “us” and didn’t appreciate “our” values*” (Skocpol, 1984: 87).

Pandangan Kartodirdjo tersebut sesuai dengan pendapat Adam yang menyatakan bahwa sejarah nasional Indonesia sudah seharusnya meninggalkan tradisi penulisan sejarah yang didominasi oleh kisah *big man* dan mulai mengandalkan paradigma pencerahan dalam historiografi (Purwanto dan Adam, 2005: 43). Sejauh ini isi dari keseluruhan historiografi Indonesia masih belum adil dalam memberikan ruang bagi kiprah pahlawan lokal dalam sejarah. Ketika tema-tema tentang tokoh lokal ditulis, perhatian publik tidak begitu besar, sehingga tulisan itu hanya sekali berarti setelah itu ditinggalkan. Kisah-kisah heroisme dari *big man* memang lebih menyenangkan dibaca, karena dalam narasinya, kisah-kisah tersebut memberikan pengalaman yang tidak biasa dan kadang kala lebih menyerupai mitos daripada realitas. Misalnya tentang Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia itu selalu digambarkan sebagai ratu adil, titisan Dewa di muka bumi, mesias di abad modern dan banyak lagi. Semua anggapan itu musnah setelah di akhir hayat, Bung Karno tidak mampu mengendalikan keadaan, dan ia pun jatuh. Seketika pandangan masyarakat berubah, bahwa Soekarno juga merupakan manusia biasa.

Soekarno adalah seorang Jawa yang mencintai kebudayaan leluhurnya. Pertunjukan wayang adalah yang paling ia gandrungi sejak kecil. Dari cerita wayang ini pulalah, Soekarno menyerap mitologis Ratu Adil dalam ramalan Jayabaya. Ratu adil akan membawa manusia kepada zaman keemasan. Rakyat akan terbebas dari penderitaan.

Semua bentuk pertarungan dan ketidakadilan lenyap, bebas pajak, semua kebutuhan pokok terpenuhi. Bagi Soekarno, gagasan mitologis ini, memberikan sikap ideologi pembebasan, keadilan, dan bagaimana hubungan antara penguasa dan masyarakat (Suhelmi, 1999: 11).

Karakter keras dan militan yang dibentuk melalui filsafat wayang, semacam disempurnakan setelah ia hidup sebagai mahasiswa *Technische Hoogeschool te Bandoeng*, bergabung dengan organisasi Islam modernis Persatuan Islam di bawah pimpinan Ahmad Hasan. Salah satu ciri menonjol organisasi Muslim modernis ini adalah, sifatnya yang militan dalam membela prinsip-prinsip Islam. Dalam istilah Federsfield (1970: 26) "organisasi Muslim fundamentalis" yang diidentikkan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin (Mesir) dan Jamaat Islami (Pakistan).

Karakter ketokohan Bima dan fundamentalisme yang diperoleh dari organisasi Persatuan Islam inilah, yang dibawa Soekarno muda memasuki gelanggang politik, dalam setiap aktivitasnya melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai Dahm mengatakan, "Soekarno hanya dapat dipahami melalui ketokohan Bima" (Dahm, 1987: 32). Proses identifikasi diri Soekarno yang ingin menyerupai Bima itulah yang menjadi titik awal dari penggambaran Soekarno sebagai ksatria yang datang dari masa depan, meskipun mitos itu sudah sangat keterlaluan jika dianggap sebagai sebuah tafsir, Soekarno adalah manusia biasa yang sering lalai dan terlena oleh jabatan kekuasaan.

Menjelang pertengahan abad ke-20, sosok Soekarno adalah *role model* bagi kaum muda. Soekarno adalah ideolog dan pemikir politik yang ide-ide besarnya banyak memengaruhi dasar-dasar Nasionalisme Indonesia. Pertikaiannya dengan kalangan Masyumi dan Militer sedikit banyak memengaruhi kejatuhannya di tahun 1966. Kebencian yang terakumulasi ditambah dengan kekecewaan yang menggelembung besar telah meledakkan Indonesia ke dalam tragedi paling berdampak pada arah kebijakan politik-ekonomi Indonesia. Soekarno jatuh dan berhenti dipuja, dan Soeharto naik ke puncak kekuasaan (Feith and Castle: 1970: 76).

Seperti halnya Soekarno, Soeharto merupakan tokoh yang mengalami pengkultusan oleh rakyat Indonesia selama 32 tahun berkuasa.

Sebagaimana disampaikan Abdullah (2016: 7) bahwa setiap peralihan rezim pemerintahan, terjadi perubahan metodologi dan ideologisasi penulisan sejarah. Jika rezim Soekarno membangun sejarah Indonesia sebagai hasil dari perbenturan antara kolonialisme dan imperialisme melawan nasionalisme Indonesia dengan Soekarno sebagai pusat, maka Orde Baru melihat sejarah Indonesia sebagai hasil dari perjuangan antara pendukung dan penentang Pancasila dengan menempatkan militer sebagai faktor penentu. Orde Baru hanya menggantikan Soekarno dengan militer, sementara itu para penentang Pancasila telah menggantikan posisi kolonialisme dan imperialisme sebagai kambing hitam (McGregor, 2008: 78).

Ciri dari historiografi nasional yang dibentuk selama masa Orde Baru adalah sentralitas negara yang diejawantahkan oleh militer. Sejarah nasional disamakan dengan sejarah militer dan produksi sejarah dikendalikan oleh negara dan militer. Pada akhirnya versi militer tentang kejadian di 1965 mendominasi historiografi periode tersebut dan melegitimasi naiknya rezim Orde Baru (Adam, 2006: 23). Sejarah yang dimitoskan, adalah cara Orde Baru dalam mengukuhkan kekuasaannya selama 32 tahun. Orde Baru telah membiarkan masyarakat menafsirkan sejarah menggunakan logika yang dangkal. Satu-satunya tokoh yang harus dan wajib dikenal pada masa itu adalah Soeharto. Buku-buku di sekolah mengajarkan itu, baliho-baliho dan reklame di jalanan menampilkan foto-foto Soeharto sebagai seorang penyelamat bangsa.

Heroisme dalam sejarah Indonesia lebih sering didominasi sebagai kisah mitos yang sulit dicerna dengan nalar. Selain kebudayaan yang mendukung hal itu, faktor politik paling dominan dalam menentukan. Soetrisno (2006: 143) menjelaskan bahwa rekonstruksi sejarah yang terkontaminasi kepentingan penguasa tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sejarah yang tidak netral berpotensi membentuk opini publik yang sesat. Aizid (2014: 57) berpendapat, bahwa narasi sejarah kepahlawanan yang ada di Indonesia saat ini masih sarat dengan kontroversi karena pembahasan sejarah bersifat spiral dan berputar-putar di titik yang sama. Misalnya dalam kajian kepahlawanan Soekarno dan Soeharto, kedua

tokoh itu lebih cenderung digambarkan sebagai mitos daripada realitas dalam masyarakat Indonesia.

Realitas yang dapat dijelaskan dalam narasi sejarah heroisme di Indonesia adalah tentang pencapaian-pencapaian dan kondisi politik yang bersifat rasional. Namun hal itu justru jarang dimunculkan dalam narasi sejarah Indonesia. Kisah-kisah mitos seperti kesaktian dan magis dari Soekarno dan Soeharto lebih sering ditonjolkan untuk membuat pandangan masyarakat tentang kedua tokoh tersebut menjadi kabur, dan pada akhirnya jatuh pada proses pengkultusan. Purwanto dan Adam (2005: 67) menjelaskan, bahwa rekonstruksi sejarah heroisme perlu diawali dengan paradigma pelurusan sejarah. Salah satu strategi pelurusan sejarah kepahlawanan Indonesia yaitu dimulainya penulisan sejarah orang-orang kecil yang namanya terkubur oleh narasi *big man*. Firdaus (1999: 34) berpendapat, bahwa sejarah yang dibutuhkan untuk dipelajari masyarakat harus mengandung nilai-nilai humanisme. Tokoh seperti Nitisebito dan Oei Tiong Ham jika ditulis dalam historiografi akan menambah muatan humanisme dalam penulisan sejarah kepahlawanan Indonesia.

PARADIGMA PENCERAHAN DALAM MEMAHAMI SEJARAH KEPAHLAWANAN

Pemahaman kesejarahan yang masih dipenuhi dengan mitos akan membuat pengetahuan sejarah menjadi keruh dan sulit dipahami menggunakan akal sehat. Kuntowijoyo (2013: 14) menjelaskan, bahwa sejarah perlu ditulis dengan paradigma pencerahan, supaya publik atau khalayak dapat mencerna narasi sejarah secara jernih. Wardo (2017: 126) berpendapat, bahwa aspek prosedural dan struktural tidak dapat dilepaskan dalam penulisan sejarah, seperti sebuah mosaik, sejarah perlu dikaji secara kritis supaya dapat ditarik antitesis yang tepat pascaanalisis. Pencerahan dalam sejarah perlu diawali dengan penulisan sejarah secara adil, bukan saja sejarah nasional namun sejarah lokal juga penting diperhatikan dalam proses pembukuan. Penelitian-penelitian sejarah lokal dapat dijadikan pendukung atau penguat narasi sejarah nasional, bukan sebaliknya (Kartodirdjo, 2016: 83).

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di lokasi yang kecil, desa atau kota kecil pada umumnya, tidak menarik karena tidak mempunyai dampak luas. Jadi, tidak penting. Namun ada kalanya sejarah lokal sangat menarik oleh karena mengungkapkan soal-soal kemanusiaan secara khusus (Collingwood, 2001: 156). Historiografi Pembebasan sebagaimana dikemukakan oleh Sulistiyono dapat menjadi alternatif dalam mengeksplorasi perihal masalah kemanusiaan yang terjadi di masa lalu dalam lingkup lokal. Perspektif ini juga dapat digunakan sebagai kritik atas kemapanan historiografi umum (Sulistiyono, 2016: 12). Di balik itu, dalam konteks Indonesia, penulisan sejarah lokal masih menghadapi kesulitan sumber-sumber. Braudel (1980: 6) berpendapat bahwa sejarah adalah anak pada masanya, satu kosa kata yang mengejutkan betapa berharganya kepingan sejarah yang ada dalam sebuah bangsa. Narasinya perlu terus dijaga, dan ingatan tentangnya perlu untuk selalu dirawat.

Untuk mengurangi muatan mitos dalam sejarah, narasi sejarah perlu diperkaya dengan ide-ide rasional. Meminjam konsep Vico tentang pendekatan sejarah (dalam Gardiner, 1959: 11) bahwa secara umum, pendekatan Vico terhadap sejarah menandakan suatu keberangkatan dari interpretasi yang dimulai dari asumsi rasionalistik atau agama tentang pikiran manusia atau alam semesta. Sejarah penting ditulis secara komprehensif supaya dapat diperoleh pengetahuan yang utuh. Pengetahuan tentang tokoh lokal adalah bagian dari keseluruhan sejarah nasional yang masih tercecce. Foucault (1976: 18) menjelaskan, bahwa di dalam pengetahuan tersebut terselip nilai-nilai sosio-kultural yang mencerminkan keadaan suatu masyarakat.

Konsep alternatif yang dapat digunakan untuk memahami sejarah kepahlawanan menggunakan paradigma pencerahan adalah pahlawan lokal. Konsep ini adalah pemberontakan terhadap gagasan *big man* dalam sejarah Indonesia. Secara etimologi, *local hero* berasal dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu *Local* yang berarti lokal dan *Hero* berarti pahlawan. Secara interpretatif, pahlawan lokal telah memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat di dalam komunitasnya maupun di luar komunitasnya. Menurut Hook (1999: 23), pemaknaan pahlawan

ditandai dengan cara yang secara kualitatif unik, catatan pencapaian dalam bidang apa pun adalah sejarah perbuatan dan pikiran para pahlawan.

Konsep dan narasi pahlawan lokal memiliki visi menghadirkan sejarah secara lebih dekat dengan pembacanya. Dalam konteks pendidikan, pahlawan lokal memberikan peluang-peluang interpretasi sesuai dengan pengalaman peserta didik selama hidup di lingkungan sosial dan budayanya (Ritzer, 2006: 35). Tidak jarang, narasi pahlawan lokal akan bercorak kulturis, dengan memadukan asumsi budaya dengan nalar ilmiah. Perlu dicatat, menurut Romadi dan Kurniawan (2017: 83), bahwa dari tegur-sapa budaya lokal, nasional, maupun internasional dapat saja kemudian terjadi akulturasi budaya (penyesuaian diri), asosiasi budaya (penggabungan), dan degradasi budaya (penurunan). Tiga hal yang dikemukakan tersebut adalah konsekuensi logis ketika pahlawan lokal disusun naskah historiografi.

Sejarah kepahlawanan yang didominasi oleh ketokohan Soekarno dan Soeharto sudah semestinya mendapatkan penolakan yang serius. Pahlawan lokal merupakan alternatif konsep yang dapat digunakan sebagai pembanding dari narasi sejarah kepahlawanan yang dipenuhi mitos dan kisah-kisah irasional. Hasan (2012: 8) menjelaskan bahwa pemahaman yang luas tentang kategori pahlawan akan semakin mendorong siswa untuk memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih universal. Heroisme pada diri pahlawan lokal tidak dapat dijelaskan sebagai sebuah dongeng belaka, melainkan perlu ada narasi yang jelas dan dilengkapi dengan fakta sejarah yang memadai (Carr, 2014: 49). Pahlawan lokal juga merupakan bagian dari ingatan kolektif masyarakat yang perlu untuk dilestarikan. Halbwachs (2011: 54) menyatakan bahwa proses mengingat adalah proses kolektif, bagian dari proses sosial, maka selalu terbuka untuk proses tafsir dan perubahan. Di samping itu, Astrid (2008: 13) menjelaskan, bahwa identitas pribadi setiap orang maupun kelompok selalu tertanam dalam konteks sosial, yakni di dalam ingatan kolektif masyarakatnya.

Hasrat Mengingat yang Dilupakan Sejarah

Bangsa Indonesia secara keseluruhan hidup di antara budaya lisan yang lebih kuat daripada

budaya tulis. Banyak sumber-sumber sejarah yang diperoleh para sejarawan berasal dari cerita lisan di masyarakat. Catatan-catatan masa lalu sangat sulit didapatkan, kecuali hal itu direkam dalam sebuah recorder khusus yang digunakan untuk merekam kisah-kisah masa lalu di masyarakat, akan tetapi hal itu tidak mungkin, satu-satunya perekam yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat adalah ingatan. Bagi masyarakat Indonesia, sejarah adalah nilai yang harus diresapi ke dalam hati terdalam. Pengetahuan atau ingatan tentang itu adalah bentuk monumentasi sejarah. Ingatan itulah yang menjadi modal utama dalam merayakan sejarah. Menurut Lohanda (2007: 98), masyarakat Indonesia merupakan satu masyarakat yang menghormati masa lalunya dengan perayaan-perayaan, festival, dan pameran-pameran. Hal itu adalah bentuk dari monumentasi sejarah yang secara tidak langsung telah menghilangkan makna dan esensi sejarah. Budiawan (2013: 150) menjelaskan bahwa ingatan sejarah tidak dapat bertransformasi menjadi ingatan sosial yang menancap di pikiran masyarakat jika ingatan itu telah ditanam di dalam monumen-munumen, baik yang bersifat fisik maupun ritualistik. Banyak masyarakat Indonesia menghormati masa lalunya, tetapi tidak untuk pemahaman tentang masa lalu itu sendiri. Hal ini dibuktikan berdasar fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, dalam konteks ini politik historiografi juga berperan besar.

Salah satu ingatan sejarah yang coba dihapus dari benak masyarakat adalah tentang pahlawan lokal. Sebagai negeri yang memiliki keberagaman suku dan budaya, potensi penggalian pahlawan lokal di Indonesia sangat besar dan terbuka. Masalah muncul ketika orientasi akademisi yang fokus di bidang sejarah telah terpengaruh oleh *mindset* sejarah politik dan politik sejarah. Akhirnya, arah penulisan maupun pengajaran banyak yang ditujukan ke kajian tentang pergeseran kekuasaan, kudeta, kepemimpinan orang-orang besar, dan ideologi kekuasaan. Begitu melimpahnya kajian dengan tema-tema tersebut, membuat sejarah Indonesia sangat menjenuhkan. Setelah Sartono Kartodirdjo, sejarah Indonesia banyak ditulis menggunakan pendekatan kritis, tetapi corak dan tema kajiannya masih bertahan di titik yang sama. Hadler (2008: 982) melihat sejarah Indonesia sebagai sejarah yang bersifat

official, banyak sejarah versi penguasa yang sebenarnya perlu dikritisi dengan menyodorkan narasi tandingan. Hal itu dimaksudkan bukan saja untuk menentang hegemoni ideologi, melainkan juga untuk mengkritik secara total sejarah yang ditulis dengan maksud melegitimasi sebuah kekuasaan politik. Narasi tandingan itulah yang akan membuat sejarah Indonesia lebih menarik untuk diingat daripada dilupakan. Ingatan-ingatan kecil tentang narasi yang berbeda itu jika didistribusikan secara masif akan menjadi ingatan sosial bagi masyarakat. Ingatan sosial artinya, ingatan yang dijiwai oleh kebanyakan anggota masyarakat. Mereka meyakini itu sebagai masa lalu bersama yang harus diingat sebagai pengetahuan dan kearifan yang dapat digunakan sebagai penuntun ke masa depan.

Corak ideologi yang begitu kuat mencengkram historiografi Indonesia telah membuat nama-nama pahlawan lokal berada di garis terluar dari sejarah Indonesia. Upaya untuk mengkritik hegemoni kekuasaan yang telah memengaruhi ingatan sosial masyarakat tentang sejarah adalah jalan yang panjang untuk menyeimbangkan historiografi Indonesia yang selama ini condong ke arah ingatan sejarah politik, padahal banyak aspek yang dapat ditulis di dalam sejarah. Ingatan politik hanya aspek kecil, aspek-aspek lain seperti etos kerja, agama, keperkasaan bumiputera, dan nasionalisme daerah menjadi topik menarik yang perlu diperbincangkan secara kritis dalam sejarah Indonesia. Tema-tema itu menjadikan sejarah Indonesia lebih berwarna dengan menganut aliran weberian yang memegang prinsip bahwa kehidupan manusia digerakan oleh ide-ide besar yang menginspirasi banyak orang.

Ingatan sejarah yang paling politis dalam sejarah Indonesia adalah mengenai perlawanan kepada kolonialisme Belanda. Hal ini mengingat Belanda menguasai Indonesia dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia selama 3,5 abad lamanya sejak 1602. Pada masa itu, perlawanan untuk mengusir penjajahan Belanda di Indonesia antara 1602 hingga 1949 berlangsung secara berkelanjutan. Bukan hanya melalui jalur politik dan militer, perlawanan itu berlangsung secara simultan dengan mengandalkan berbagai macam aspek dalam kehidupan masyarakat. Dari perlawanan itu banyak muncul tokoh-tokoh lokal

yang berjuang secara gigih untuk memerdekakan tanah airnya. Mereka mengusahakan kemerdekaan Indonesia melalui jalur ekonomi, sosial-budaya, pers dan banyak lagi. Namun historiografi sangat jarang membahas itu sebagai sebuah kisah heroik yang dapat dijadikan sebagai sebuah inspirasi bagi generasi muda. Anak-anak Indonesia yang baru tumbuh, setelah memasuki sekolah dasar akan langsung ditanamkan ingatan tentang perlawanan berdarah, pergeseran kekuasaan, kudeta politik, kisah tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Soeharto, dan Soedirman. Hal ini tentu keluar dari koridor akademis, bahwa tokoh-tokoh yang disebutkan itu notabene merupakan tokoh nasional yang memang sudah sangat populer. Akan tetapi generasi baru Indonesia ini tidak pernah diajarkan tentang pahlawan lokal, perjuangan dari jalur yang lain, bukan hanya politik dan kekuasaan, tetapi ada pula perjuangan melalui jalur ekonomi untuk menandingi hegemoni Belanda dalam mengeksploitasi sumber daya ekonomi Indonesia. Kapitalisme Bumiputera tumbuh di tengah kerasnya cengkeraman kolonialisme. Di Kudus Kulon hal itu dirawat hingga saat ini, masih dapat dijumpai ingatan masyarakat tentang kisah-kisah Nitisemito dan Sunan Kudus, yang telah menginspirasi mereka untuk bergerak menjadi masyarakat mandiri.

Meskipun masih menjadi istilah yang asing bagi bangsa Indonesia, keberadaan pahlawan lokal tetap harus dimuliakan sebagai bagian dari sejarah bangsa ini. Jika penulisan sejarah yang politis ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin jika masyarakat akan semakin menjauhi sejarah bangsanya sendiri, bahkan mereka akan menuju masyarakat tanpa sejarah. Hal ini mengingat, masyarakat dalam proses pendidikan sejarah lebih sering diajari tentang nama-nama pahlawan nasional daripada pahlawan lokal. Padahal aspek lokal dalam penulisan maupun pengajaran sejarah juga penting diperhatikan (Mulyana, 2013: 83). Di dalam sejarah yang bertemakan lokalitas, seperti tokoh, peristiwa, budaya, atau fenomena sosial memiliki unsur kearifan lokal yang penting diajarkan bagi generasi yang baru tumbuh. Kochhar (2008: 39) berpendapat, bahwa pengajaran sejarah kepahlawanan saat ini cenderung monoton, hal ini karena banyak tema yang disajikan secara demagogis dan kurang

menarik. Sejarah kepahlawanan bagi satu negara yang menganut fanatisme ideologi menjadi satu media pendidikan politik yang mengandung unsur-unsur doktrin dalam proses pengajarannya. Bagi masyarakat yang sudah memiliki kesadaran, di Indonesia masyarakat tersebut adalah masyarakat perkotaan yang telah memiliki pendidikan cukup. Mereka memahami sejarah yang demikian sebagai sejarah penguasa yang ditulis dan diajarkan dengan maksud melegitimasi kekuasaan. Hal ini sudah keluar dari koridor akademik yang menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan untuk diajarkan dari generasi ke generasi.

Proses mengingat sejarah sama artinya dengan upaya merawat ingatan sosial sebuah bangsa. Kekhawatiran yang muncul saat membahas isu-isu seputar sejarah lokal adalah munculnya sifat etnosentris dan primordialistis. Sifat-sifat tersebut dinilai dapat merusak integrasi bangsa yang selama ini dipertahankan melalui pikiran dan senjata. Sikap apriori terhadap sejarah lokal sudah semestinya dibuang jauh-jauh dari paradigma pemikiran seorang ilmuwan, masyarakat Indonesia hari-hari ini tengah berkembang maju menuju masyarakat modern yang mengedepankan unsur rasionalitas dalam kehidupannya sehari-hari. Prasangka yang pada akhirnya membatasi berkembangnya ilmu pengetahuan sudah sewajarnya disingkirkan dari alam pikiran seorang intelektual. Kajian sejarah lokal juga mendapatkan pengakuan dari insan akademisi dunia sebagai satu aspek sejarah yang penting diperkaya dan diajarkan melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Hasrat untuk mengembalikan ingatan sejarah masyarakat yang hilang itu adalah dengan cara politik ingatan. Strategi ini pernah dilakukan oleh Orde Baru, rezim yang berkuasa selama 32 tahun sejak 1966 hingga 1998 di Indonesia itu menggunakan politik ingatan untuk sepenuhnya melegitimasi kekuasaan militer di Indonesia. Sejarah yang ditulis dan diajarkan lebih banyak mengandung materi bercorak militerisme dan perjuangan bersenjata sebelum kemerdekaan Indonesia. Kisah-kisah pengusaha pejuang maupun orang-orang kecil yang berperan besar di daerah dihapus dari ingatan sosial masyarakat. Soeharto telah menancapkan satu corak penulisan sejarah yang paling buruk di Indonesia. Selain

menghilangkan peran sipil, ia juga telah menghancurkan historiografi feminis dengan menempatkan perempuan di posisi yang tidak diperhitungkan. Sehingga historiografi pahlawan lokal dan historiografi feminis di Indonesia hingga kini sangat kering kajian dan jarang diminati oleh masyarakat sejarawan Indonesia. Nichterlein (1974: 263) menjelaskan, bahwa historisitas dalam penulisan sejarah Indonesia cenderung patriarkis. Kisah-kisah kepahlawanan yang diangkat cenderung mengarah pada pembahasan kaum laki-laki. Posisi perempuan tidak diperhitungkan sebagai satu ingatan yang penting. Hal ini dapat menjadi wacana lanjutan yang perlu ditindaklanjuti oleh kalangan sejarawan dalam upaya untuk mengingat yang dilupakan.

Kisah-kisah tentang pahlawan lokal sebenarnya memiliki determinasi untuk membentuk satu konstruksi sosial masyarakat tentang asal usul mereka. Narasi pahlawan lokal yang masih sangat jarang dijumpai di Indonesia perlu diperkaya melalui proyek penelitian berskala besar dan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Pahlawan lokal seperti Nitisemito yang juga memiliki peran besar dalam menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia perlu diangkat kisahnya ke panggung sejarah yang lebih terhormat. Begitu pula kisah sejarah yang serupa di berbagai daerah, misalnya saja Tjong A Fie di Sumatera Utara yang merupakan Tionghoa dermawan dan dikenal oleh orang-orang seantero Sumatera sebagai seorang humanis yang mendermakan dirinya untuk menolong orang-orang kecil yang hidup di bawah ketertindasan. Narasi sejarah yang semacam inilah yang dibutuhkan bagi historiografi Indonesia dewasa ini. Sejarah bukan lagi menjadi panggung bagi sang pemenang, melainkan orang-orang kecil yang dilupakan sejarah perlu ditarik lagi ke tengah gelanggang untuk dikenal dan diingat kembali sebagai tokoh bangsa yang berperan besar dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Poesponegoro dan Notosusanto (2011: 334) berpendapat, bahwa sejarah Indonesia diisi oleh orang-orang besar yang berperan dalam membangun peradaban bangsa. Hal ini sudah semestinya mendapat kritik untuk meluruskan paradigma dalam penulisan sejarah. Pernyataan dari kedua ilmuwan itu dalam buku besarnya tentang Sejarah Nasional Indonesia VI sudah tidak

relevan lagi dengan semangat zaman reformasi di Indonesia.

Pada masa reformasi seperti saat ini, masyarakat telah bergerak ke arah yang lebih modern dengan mengedepankan pikiran-pikiran rasional dalam melihat perkembangan peradaban dunia. Ketakutan akan disintegrasi bangsa hanya karena mempelajari sejarah lokal sudah tidak pantas lagi dipertahankan dalam alam pikiran sejarawan. Sejarah, sekecil apa pun itu, sepele apa pun itu perlu tetap ditulis dan direkam sebagai ingatan sosial yang tidak boleh dilupakan. Sejarah menjadi penuntun suatu masyarakat untuk berjalan maju ke depan. Sejarah lokal juga menjadi satu kajian yang istimewa, mengingat pengaruh globalisasi yang dihembuskan oleh dunia Barat telah menginfeksi dunia Timur dari segi peradaban budaya dan politik. Sejarah lokal dalam kaitannya dengan kearifan suatu daerah menjadi medium yang paling sesuai untuk merawat dan melakukan upaya konservasi nilai-nilai daerah. Sejarah lokal juga menjadi satu kritik bagi narasi sejarah nasional yang bercorak ideologi dan cenderung pro-kekuasaan. Sejarah Indonesia perlu mendapatkan koreksi total untuk menyusun struktur dan komposisi baru dalam historiografi Indonesia. Pada konteks penulisan sejarah, masalah kritik dan koreksi ini penting dilakukan dalam kaitannya dengan penguatan fakta, nilai, dan kebermaknaan dari sebuah historiografi (Coman, 2018: 121). Sejarah lokal tidak membunuh kebermaknaan dari sejarah nasional, melainkan sejarah lokal adalah pendukung sejarah nasional. Tidak ada permasalahan mendasar ketika sejarah nasional dan sejarah lokal coba dikaitpautkan dan dipelajari secara akademis dan kritis (Herlina, 2009: 89). Keduanya harus sepadan dalam historiografi Indonesia.

SIMPULAN

Politik historiografi telah menjadikan narasi sejarah kepahlawanan Indonesia menjadi kering dan mengendap. Proses pengkajiannya berjalan spiral di titik yang sama. Ketokohan Soekarno dan Soeharto menjadi yang paling mendominasi buku-buku selama 50 tahun terakhir. Dampak negatif dari proses itu adalah pengetahuan masyarakat tentang kepahlawanan menjadi dangkal dan sempit, pahlawan hanya dimaknai sebagai kiprah politik

seorang tokoh, padahal makna kepahlawanan sendiri cukup luas, bukan saja dari aspek politik. Pahlawan juga dapat dipandang melalui aspek ekonomi, sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Untuk menggeser pengetahuan dan ingatan sosial yang politis itu dibutuhkan paradigma pencerahan dalam penulisan maupun pengajaran sejarah kepahlawanan Indonesia. Upaya untuk mengingat kembali hal-hal yang dilupakan sejarah merupakan langkah strategi untuk melakukan desakralisasi sejarah yang ideografis dan diman-faatkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Padahal makna kepahlawanan dalam sejarah bukan sekadar bersifat politis dan membentuk masyarakat yang mengenali pahlawan nasional-nya, tetapi ada nama-nama pahlawan yang juga perlu disebut, diingat kembali sebagai ingatan sosial masyarakat dan diberi sedikit ruang dalam historiografi Indonesia. Mereka adalah orang-orang kecil, orang-orang yang dimarginalisasi oleh keputusan politik bangsanya sendiri. Untuk dapat membuka kembali diskursus itu, salah satu strategi alternatif yang dapat digunakan adalah dengan memasukan unsur pahlawan lokal dalam proses pembukuan sejarah. Selain dapat memberikan keseimbangan dan keadilan, pahlawan lokal adalah bingkisan pengetahuan yang memuat unsur etis dan estetis secara sekaligus, sehingga rekomendasi utama dalam tulisan ini bahwa historiografi Indonesia perlu mengakomodasi narasi sejarah pahlawan lokal dan memori kolektif yang melingkupinya sebagai pelengkap narasi *mainstream* yang diciptakan oleh penguasa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada guru yang telah dengan sabar memberikan bimbingan hingga tulisan ini dapat selesai sebagai syarat untuk ujian Tesis. Kepada Prof. Dr. Sariyatun, M. Pd., M. Hum., Prof. Dr. Hermanu Joebagy, M. Pd., Prof. Dr. Wasino, M. Hum., Dr. Hamdan Tri Atmaja, M. Pd., Dr. Sutikno, M. Si., dan Drs. R. Suharso, M. Pd., penulis berterima kasih atas segala dukungan dan bimbingan.

REFERENSI

Abdullah, T. (2016). "Historiografi dalam Denyut Sejarah Bangsa". *Kalam*, (28): 1-28.

- Abdullah, Taufik, dkk. (1999). *Membangun Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Adam, Asvi W. (2006). *Soeharto File: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam, Asvi W. (2018). "Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965". *Archipel*, Vol. 95 (1): 11-30.
- Agung, Leo S. (2015). "The Role of Social Studies and History Learning in Junior High School in Strengthening the Students Character". *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 25 (2): 238-246.
- Aizid, Rizem (2014). *Menguak Kontroversi-Kontroversi Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Saufa.
- Ankersemit F. R. (1987). *Refleksi Tentang Sejarah: Pendapat-Pendapat tentang Filsafat Sejarah*. (Terjemahan Dick Hartoko). Jakarta: Gramedia.
- Braudel, Fernand. (1980). *On History*. (Translation by Sarah Matthews). Chicago: University of Chicago Press.
- Budiawan (Ed.) (2013). *Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Budiman, A. "Oei Tiong Ham", *Suara Merdeka*, 23 Juli 1976.
- Budiman, Amen dan Ong Hok Ham (1987). *Rokok Kretek: Lintasan Sejarah dan Artinya bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. Kudus: PT. Djarum.
- Carnegie, Paul J. (2008). "Democratization and Decentralization in Post-Soeharto Indonesia: Understanding Transition Dynamics". *Pacific Affairs*, Vol. 81, (4): 1-14.
- Carr, E. H. (2014). *Apa Itu Sejarah?* Depok: Komunitas Bambu.
- Castles, Lance. (1982). *Religion, Politics, and Economic Behavior in Java, The Kudus Cigaretts Industry*. Jakarta: Grafitas.
- Collingwood, R. C. (2001). *The Principles of History*. New York: Oxford University Press.
- Coman, A. (2018). "Rewriting Israeli History: New Historioans and Critical Sociologists". *Historicka Sociologie*, Vol. 1, (1): 107-122.
- Crouch, Harold (2010). *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Dahm, Bernhard (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta. LP3ES.
- Dmitri A. Funk (2016). "Religious Component of Modern Cultural Identity of the Peoples of the North and Siberia: Introduction to the Issue's Special Theme". *Siberian Historical Research*, (1): 40-45.
- E. McGregor, Katherine (2008). *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Syarikat.
- Erl, Astrid., Nünning, Ansgar. (2008). *Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook*. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co.
- Federsfield, Howard. (1970). *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Feith, Herbert dan Lance Castle (Eds.) (1970). *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. London: Cornell University Press.
- Fernando, M. R. dan David Bulbeck. (1992). *Chinese Economic Activity in Netherlands India*. Singapore: ISEAS.
- Firdaus, A.N. (1999). *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh Berulang Lagi di Era Reformasi*. Jakarta: Alkautsar.
- Foucault, Michel (1976). *The Archaeology of Knowledge*. (Translation by Alan M. Sheridan Smith). New York: Harper & Row Publisher.
- Gardiner, Patrick (1959). *Theories of History*. New York: The Free Press.
- Hadler, J. (2008). "A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History". *The Journal of Asian Studies*, Vol. 67 (3): 971-1010.
- Halbwachs, Maurice (2011). *On Collective Memory*. (Translation by Lewis A. Coser). Chicago: University of Chicago Press.
- Hasan, S. H. (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia, Isu dalam Ide dan Pembelajaran*. Bandung: Penerbit Rizky.

- Herlina, Nina (2009). *Historiografi Indonesia dan Permasalahannya*. Bandung: Satya Historika.
- Hook, Sidney. (1999). *The Hero on History*. Boston: Beacon Press.
- Ileto, Reynaldo C. (2002). "On the Historiography of Southeast Asia and the Philippines: The 'Golden Age' of Southeast Asian Studies-Experiences and Reflections". *Proceedings of the Workshop on "Can We Write History?" Between Postmodernism and Coarse Nationalism*. Meiji Gakuin University.
- Jaiz, H.A. (1999). *Di Bawah Bayang-Bayang Soekarno, Soeharto: Tragedi Politik Islam Indonesia dari Orde Lama hingga Orde Baru*. Jakarta: Darul Falah.
- Kartodirdjo, Sartono (1984). *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartodirdjo, Sartono (2016). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kochhar, S. K. (2008). *Teaching of History*. New Delhi: Sterling Publishers.
- Kuntowijoyo (2003). *Metodologi Sejarah*. Edisi Dua. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Edisi Paripurna. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo (2008). *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, Ganda Febri (2018). "Pengajaran Sejarah Lokal sebagai Counter Wacana Ekstremisme Global di Indonesia (Studi Kasus di Dua Tempat)". Dalam Anne Shakka Ariyani and A. Harimurti (Ed.) *Nasionalisme di Tengah Kewargaan Budaya dan Ekstremisme Global*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Liem Tjwan Ling (1991). Raja Gula: Oei Tiong Ham, in Yoshihara Kunio (Ed.) *Konglomerat Oei Tiong Ham Kerajaan Bisnis Pertama di Asia Tenggara*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Lohanda, M. (2007). *Sejarah para Pembesar Mengatur Batavia*. Masup Jakarta.
- Mulyana, Agus (2013). Nasionalisme dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA. *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 23, (1): 78-87.
- Nagazumi, Akira (1968). *Toward An Autonomous History of Indonesia*. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1/deve.1968.6.issue-2/issuetoc>, accessed 10 July 2018.
- Natalia P, Matkhanova (2016). Authorities and State Officials as Potrayed in The 19th Century Memoirs of Siberian Merchants. *Siberian Historical Research*, (2): 58-75.
- Nichterlein, S. (1974). Historicism and Historiography in Indonesia. *History and Theory*, Vol. 13 (3): 253-272.
- Nikolay N, Kradin, et al. (2018). "Cities and Palaces of the Mongol Empire in Eastern Transbaikal". *Siberian Historical Research*, (2): 64-80.
- Nonna G, Alfonso (2018). "The Buddhist Ritual Dagger "Phurpa". *Siberian Historical Research*, (3): 158-177.
- Nordholt, Henk Schulte, et al. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poesponegoro, M. D. dan Nugroho Notokusanto. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. (2005). *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Purwati (2018). *Lemahnya Moral di Kalangan Peserta Didik*. <http://jatengpos.co.id/lemahnya-moral-di-kalangan-peserta-didik/> accessed 30 June 2018.
- Radjab, Suryadi (2013). *Dampak Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Bandung: SAKTI dan CLOS.
- Ritzer, George. (2006). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Romadi dan Ganda Febri Kurniawan (2017). "Pembelajaran Sejarah Lokal Berbasis Folklore untuk Menanamkan Nilai Kearifan Lokal pada Siswa". *Sejarah dan Budaya*, Vol. 11, (1): 79-94.

- Sahlins, M. (2018). "Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia". *Siberian Historical Research*, (1): 18-41.
- Said, Edward (1977). *Orientalism*. London: Penguin.
- Shiraisi, Takashi (1990). *An Age in Motion: Popular Radicalism in Jawa, 1912-1926*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Sitepoe (2000). *Kekhususan Rokok Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Skocpol, Theda (1984). *Vision and Method Historical Sociology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soetrisno, Slamet (2006). *Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Steenbrink, Karel (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suharso, R. (1994). "Masyarakat Kudus Kulon dalam Pembangunan Ekonomi". Jakarta: IKIP Jakarta.
- Suhelmi, A. (2002). *Polemik Negara Islam. Jakarta*. Teraju, 2002.
- Sulistiyono, Singgih Tri (2016). "Historiografi Pembebasan: Suatu Alternatif". *Jurnal Agastya*, Vol. 6 (1): 9-24.
- Suryana, Nanang (2012). "Learning Local and National History to Develop Heroic Values". *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XIII, (1): 131.146.
- Warto. (2017). "Tantangan Penulisan Sejarah Lokal". *Sejarah dan Budaya*, Vol. 11, (1): 123-129.
- Wertheim, W.F. (1999). *Masyarakat Indonesia dalam Transisi Studi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Wood, Michael (2013). *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Yuliati, Dewi (2009). *Menuju Kota Industri Semarang Pada Era Kolonial*. Semarang: Diponegoro University Press.